

RENCANA STRATEGIS BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015-2019



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional yang berbasis pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2109, Badan Ketahanan Pangan (BKP) menyusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Pelaksanaannya dirancang selama lima tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi kinerjanya setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Sesuai tugas dan fungsinya tahun 2015 – 2019 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Program tersebut dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Rencana Strategis BKP 2015-2019 (Revisi Ke-2) mengalami sedikit penyesuaian dari edisi sebelumnya, dalam rangka menindaklanjuti perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 (Edisi Revisi) serta sejalan dengan dinamika perencanaan program dan anggaran. Penyesuaian tersebut untuk mempertajam kegiatan strategis dan indikator kinerja BKP dan untuk mengakomodir penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).

Program dan kegiatan strategis lingkup BKP tahun 2015 – 2019 akan dilaksanakan di 34 provinsi dan sekitar 513 kabupaten/kota, antara lain: (1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, (2) Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar, (3) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia (TTI), (4) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, (5) Penguatan Kapasitas Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah, (6) Penguatan Kapasitas Produktif Masyarakat melalui Kawasan Mandiri Pangan, dan (7) Penanganan Kerawanan Pangan Kronis dan Transien.

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 ini diharapkan dapat memberikan acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat maupun Daerah, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Jakarta,
Kepala Badan Ketahanan Pangan,



Dr. Ir. Gardjita Budi, M. Agr. St
NIP. 19590329 198403 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1 Ketersediaan Energi dan Protein	3
1.1.2 Kondisi Rawan Pangan	4
1.1.3 Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	6
1.1.4 Pengelolaan Cadangan Pangan Nasional	12
1.1.5 Harga Pangan	14
1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan	19
1.2.1 Potensi	19
1.2.2 Permasalahan	24
1.2.3 Tantangan	27
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN KETAHANAN PANGAN	30
2.1 Visi Badan Ketahanan Pangan	30
2.2 Misi Badan Ketahanan Pangan	31
2.3 Tujuan Badan Ketahanan Pangan	31
2.4 Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan	31
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	33
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan	34
3.2.1 Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan	34
3.2.2 Strategi Badan Ketahanan Pangan	35
3.2.3 Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan	36
3.2.4 Kerangka Regulasi	38
3.2.5 Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1 Target Kinerja	43
4.1.1 Target Kinerja Program	43
4.1.2 Target Kinerja Kegiatan	45
4.2 Kerangka Pendanaan	46
BAB V. DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN	48
BAB VI. PENUTUP	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH Ketersediaan 2010–2014	4
2.	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH 2010–2014	7
3.	Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2010–2014	8
4.	Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah (Ton) Tahun 2010-2014	12
5.	Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2010–2014	15
6.	Perkembangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Petani Tahun 2010–2014	16
7.	Harga Rata -rata Pembelian Gapoktan Penguatan-LDPM Tahun 2010-2014	17
8.	Perkembangan Harga Beras Paritas Internasional Tahun 2010-2014	18
9.	Jenis-jenis tanaman berdasarkan pemanfaatannya	21
10.	Pokok-pokok Visi Badan Ketahanan Pangan	30
11.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019	32
12.	Bentuk Kelembagaan Ketahanan Pangan Seluruh Indonesia	41
13.	Kebutuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Tahun 2015–2019	42
14.	Target Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019	44
15.	Target Kinerja Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019	45
16.	Pendanaan APBN Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019	47
17.	Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga Terkait dalam Pembangunan Ketahanan Pangan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Kerawanan Pangan Berdasarkan Konsumsi Kalori Tahun 2010–2014 TW I	5
2.	Sebaran Lahan Sawah di Indonesia	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Sasaran Konsumsi Pangan Tahun 2015-2019	54
2.	Matriks Kerangka Regulasi	55
3.	Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019	56

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamankan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015-2019 Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Pencapaian ketahanan pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga sebagai perwujudan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang saat ini diperbaharui menjadi *Sustainable Development Goals/SDGs*, dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan.

Indonesia telah berhasil mencapai target *MDGs* poin 1 (satu) dengan menurunkan proporsi tingkat kelaparan dari 19,9 persen di tahun 1990-1992 hingga menjadi 8,6 persen pada tahun 2010-2012. Prestasi ini melebihi penurunan angka proporsi yang ditargetkan dalam *MDG* yaitu sebesar 9,9 persen (catatan FAO, Juni 2013). Badan Ketahanan Pangan, melalui program seperti Desa Mandiri Pangan,

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dan Lumbung Pangan Masyarakat, aktif memberdayakan masyarakat agar keluar dari lingkaran kemiskinan.

Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i) konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar Jawa; (iii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

1.1 Kondisi Umum

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam pemantapan ketahanan pangan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2010-2014 meliputi: ketersediaan energi dan protein, penurunan jumlah penduduk rawan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), penurunan konsumsi beras, pengawasan keamanan pangan, pemantauan harga pangan, dan penanganan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Perkembangan kinerja pemantapan ketahanan pangan periode 2010-2014 menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik dari pada periode 2004-2009, kecuali penurunan jumlah penduduk rawan pangan tidak tercapai karena kualitas konsumsi pada kelompok penduduk dengan konsumsi energi dibawah 70% Angka Kecukupan

Gizi/AKG, makin meningkat jumlahnya. Berikut ini dijelaskan gambaran pemantapan ketahanan pangan periode 2010-2014.

1.1.1 Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2200 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 57 gram/kapita/hari untuk protein.

Ketersediaan energi selama kurun waktu 2010-2014 sudah jauh di atas rekomendasi WNPG VIII dengan rata-rata 3.864 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 2,22 persen per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energi selama periode 2010-2014 ini disebabkan terjadinya peningkatan ketersediaan energi yang cukup besar pada periode 2011-2012 dan 2013-2014 karena adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan.

Seperti halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein pada periode 2010-2014 juga sudah melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG VIII dengan ketersediaan protein rata-rata 90,60 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tersebut mengalami penurunan rata-rata 2,04 persen per tahun. Kecenderungan penurunan ketersediaan protein selama periode 2010-2014 ini disebabkan penurunan produksi beberapa komoditas pangan sumber protein pada periode 2011-2012.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor. Jika dilihat dari sumbangan energi dan proteinnya, kelompok pangan nabati memberikan porsi sumbangan dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok pangan hewani. Secara nasional, ketersediaan energi dan protein per kapita per tahun dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH Ketersediaan 2010–2014

Tahun	Energi (Kalori/Hari)			Protein (Gram/Hari)			Skor PPH Ketersediaan
	Total	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	
2010 ¹⁾	3.801	3.641	160	94,56	76,84	17,71	87,93
2011	3.646	3.485	161	93,13	75,10	18,03	81,27
2012	3.896	3.707	188	88,99	73,19	15,79	83,50
2013*	3.849	3.635	214	89,26	71,81	17,45	85,41
2014**	4.130	3.922	209	87,04	69,85	17,19	86,82
Pertumb. (%)	2,22	2,01	7,22	(2,04)	(2,36)	(0,40)	(0,22)
Rata-rata	3.864	3.678	186	90,60	73,36	17,23	84,99

Keterangan:

NBM 2012 Angka Tetap, 2013 Angka Sementara, 2014 Angka Perkiraan

Sumber: Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian (Kementan)

Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2010 – 2014 menunjukkan skor rata-rata 84,99 dengan kecenderungan menurun rata-rata 0,22 persen per tahun. Skor PPH tingkat ketersediaan dari NBM tahun 2010 adalah 87,93, tahun 2011 adalah 81,27, tahun 2012 adalah 83,50, tahun 2013 adalah 85,41 dan tahun 2014 adalah 86,82. Untuk mencapai keberagaman yang ideal dan memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan, maka yang perlu ditingkatkan lagi selama tahun 2010-2014 adalah ketersediaan kelompok pangan hewani serta sayuran dan buah.

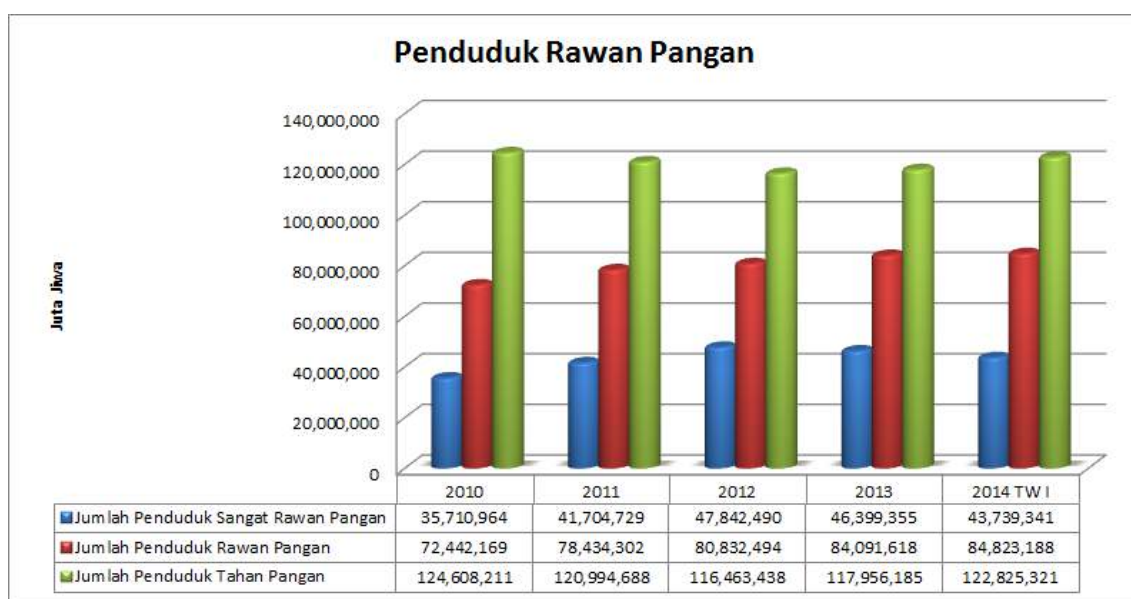
1.1.2 Kondisi Rawan Pangan

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan, meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai AKG 2.000 kkal/kap/hr. Jika konsumsi perkapita kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; antara 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk kategori tahan pangan.

Berdasarkan AKG tersebut, jumlah penduduk yang tahan pangan terus meningkat pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2012-2014) masing-masing sebesar 80,83 juta jiwa, 84,09 juta jiwa dan 84,82 juta jiwa. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tahan pangan, pada periode yang sama jumlah penduduk sangat rawan pangan mengalami penurunan dari 47,84 juta jiwa di tahun 2012 menjadi 43,74 juta jiwa pada Triwulan I tahun 2014. Sementara itu, jumlah penduduk rawan pangan mengalami peningkatan dari 80,83 juta jiwa pada tahun 2012 menjadi 84,82 juta jiwa pada Triwulan I tahun 2014. Peningkatan penduduk rawan

pangan diduga karena pergeseran dari penduduk sangat rawan pangan menjadi penduduk rawan pangan.

Jumlah penduduk sangat rawan pangan dan rawan pangan pada Triwulan I tahun 2014 masih relatif tinggi yaitu 128,56 juta jiwa atau 51,14 persen dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2014, terutama pada wilayah yang terisolir dan wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu-waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.



Grafik 1. Kerawanan Pangan Berdasarkan Konsumsi Kalori Tahun 2010–2014 TW I

Keterangan : Tahun 2014 pada Triwulan I
 Sangat rawan : Konsumsi kalori perkapita perhari < 70% dari AKG
 Rawan Pangan : Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG
 Tahan pangan : Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG
 Sumber : Data BPS-Susenas

Tingkat kerawanan pangan berdasarkan konsumsi kalori sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain penyediaan pangan, harga pangan, pendapatan keluarga, dan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan, serta pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Tingkat pendapatan yang rendah di bawah harga pangan, akan mengurangi kemampuan rumah tangga dalam mengakses kebutuhan pangan, sehingga asupan pangan pada tingkat perseorangan di keluarga akan berkurang, dan secara bertahap

akan mengarah pada timbulnya kasus gizi buruk, yang akan menciptakan kualitas sumberdaya yang lemah (*lost generation*).

1.1.3 Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar

1.1.3.1 Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan, baik secara kuantitas maupun kualitas, harus dipenuhi agar setiap orang dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG Tahun 2004, yaitu Angka Kecukupan Energi/AKE 2000 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 52 gram/kapita/hari).

Di tingkat nasional, capaian konsumsi pangan penduduk secara kuantitatif pada periode 2010-2014 menunjukkan tingkat konsumsi energi yang berfluktuasi dan cenderung menurun, dengan laju penurunan rata-rata sebesar 0,91 persen per tahun. Pada tahun 2010 dan 2011 konsumsi energi berada di atas rekomendasi WNPG yakni sebesar 2.025 dan 2.048 kkal. Namun demikian, selama periode 2012-2014 mengalami penurunan dan berada di bawah angka kecukupan gizi yakni secara berturut-turut sebesar 1.944, 1.930, dan 1.949 kkal. Penurunan konsumsi energi tersebut masih mendekati anjuran dan belum termasuk kategori defisit energi, yaitu sekitar 97,45 persen AKE. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh semakin menurunnya konsumsi beras masyarakat.

Sementara itu, konsumsi protein penduduk sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gr/kapita/hari. Pada periode 2010-2014, rata-rata konsumsi protein penduduk adalah 57,04 gr/kapita/hari atau 109,69 persen dari AKP rekomendasi WNPG. Tingginya konsumsi protein dalam pola konsumsi pangan nasional, memberikan indikasi bahwa konsumsi pangan sumber protein sudah terpenuhi. Namun jika dicermati, sumbangan konsumsi protein tertinggi penduduk Indonesia selama sepuluh tahun terakhir berasal dari protein pangan nabati terutama dari kelompok padi-padian (beras). Jadi, beras tidak hanya penyumbang energi terbesar tetapi juga merupakan penyumbang protein yang terbesar.

Perkembangan jumlah dan jenis bahan pangan yang dikonsumsi mencerminkan tingkat kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, yang dipengaruhi berbagai faktor seperti pendapatan rumah tangga, ketersediaan bahan pangan yang terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau, serta pemahaman dan tingkat kesadaran gizi masyarakat.

1.1.3.2 Perkembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pemenuhan konsumsi pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Perkembangan rata-rata kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam periode 2010-2014 yang ditunjukkan dengan pencapaian skor PPH berfluktuasi setiap tahunnya. Meskipun menunjukkan penurunan dengan laju sekitar 0,7, pada kurun waktu 2010-2013. Namun pada tahun 2014 skor PPH meningkat dibanding tahun 2013 yakni sebesar 83,4. Peningkatan skor PPH tersebut banyak dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah (Tabel 2).

Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH 2010–2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2.025	2.048	1.944	1.930	1.949
Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	57,9	59,1	55,9	55,7	56,6
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,7	85,6	83,5	81,4	83,4

Sumber : Susenas 2010–2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP

Perkembangan kualitas konsumsi pangan menunjukkan sisi keragaman pangan dengan kontribusi energi dari padi-padian yang cenderung menurun setiap tahunnya. Namun demikian, masih didominasi oleh kelompok padi-padian dengan sumbangan energi tahun 2014 sebesar 58,2 persen AKE (masih diatas proporsi ideal 50% AKE). Hal ini perlu diwaspadai, terjadinya penurunan konsumsi beras dan jagung tersebut, diharapkan agar tidak semata-mata beralih pada peningkatan konsumsi terigu/gandum. Hal ini perlu dicermati mengingat komoditas terigu merupakan komoditas impor sehingga arah perubahan konsumsi pangan tersebut diharapkan tidak menimbulkan ketergantungan pada impor.

Perkembangan kualitas konsumsi selama 2010-2014 masih belum mencapai kondisi ideal. Belum idealnya kualitas konsumsi pangan ini terjadi karena pola konsumsi pangan masih sangat tergantung pada padi-padian, dan masih kurang dalam hal konsumsi pangan hewani, sayuran dan buah serta kacang-kacangan.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tertentu tersebut, akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Pengembangan kearah pola konsumsi pangan yang sehat memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat agar dengan kemauan dan kemampuan sendiri mau mengubah pola konsumsinya ke arah yang lebih beragam dan bergizi seimbang. Untuk itu, upaya sosialisasi dan promosi yang intensif dan melibatkan beragam pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat secara utuh dan menyeluruh perlu menjadi prioritas.

1.1.3.3 Perkembangan Konsumsi Beras dan Pangan Utama

Perkembangan konsumsi pangan pokok sumber karbohidrat tahun 2010-2014 menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi pangan pokok yang cenderung mengarah ke pola tunggal beras, dari semula pola beras dan/atau umbi-umbian dan/atau jagung (Tabel 3).

Upaya untuk menurunkan konsumsi beras 1,5 persen per tahun belum tercapai. Meskipun demikian, selama periode 2010-2014 konsumsi beras masyarakat cenderung mengalami penurunan, dengan laju rata-rata 1,2 persen per tahun. Pada tahun 2009 (baseline) tingkat konsumsi beras adalah 102,2 kg/kapita/tahun dan turun menjadi 99,7 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2011 konsumsi beras kembali meningkat sebesar 101,7 kg/kapita/tahun dan terus menurun hingga tahun 2014 menjadi sebesar 96,2 kg/kapita/tahun. Idealnya, apabila konsumsi beras menurun diharapkan dapat disubstitusi dengan pangan pokok lainnya yang berbasis sumber daya lokal seperti jagung, sagu, singkong, dan ubi jalar.

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2010 – 2014

Tahun	Konsumsi (Kg/Kap/Thn)	Target (%)	Realisasi (%)
2009	102,2	-	-
2010	99,7	-1,5	-2,5
2011	101,7	-1,5	2,0
2012	96,6	-1,5	-5,0
2013	96,3	-1,5	-0,3
2014	96,2	-1,5	-0,1
Rata-rata	98,08	-1,5	-1,2

Keterangan : Konsumsi beras di tingkat rumah tangga

Sumber : Susenas 2009–2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP

Apabila konsumsi pangan masih tetap didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat, maka akan cukup memberatkan bagi upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu kepada sumber daya lokal. Berbagai permasalahan dan tingginya tantangan yang akan muncul, yang harus diantisipasi, terutama dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman antara lain : 1) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah; 2) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi; 3) Masih dominannya konsumsi sumber karbohidrat yang berasal dari beras; 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras. Kecenderungan terhadap konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ubi jalar mengalami peningkatan rata-rata tahun 2010-2014 sebesar 3,7 persen per tahun, dan sagu meningkat 4,0 persen per tahun. Namun tidak demikian pada konsumsi jagung yang cenderung menurun rata-rata 5,3 persen per tahun, dan singkong turun 7,8 persen per tahun.

Perkembangan konsumsi pangan sumber protein tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, dengan pola konsumsi pangan hewani didominasi oleh ikan (rata-rata peningkatan konsumsi 0,2 persen per tahun). Komoditas sumber protein lain yang banyak dikonsumsi penduduk yaitu telur dan daging unggas. Kedua komoditas tersebut menjadi komoditas utama bagi penduduk dalam memenuhi kecukupan protein per hari, mengingat aksesibilitasnya (harga dan ketersediaan) yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, komoditas pangan sumber protein yang masih sangat minim dikonsumsi yaitu susu dan daging sapi. Meskipun demikian, komoditas susu meningkat rata-rata 3,0 persen per tahun dan daging sapi mengalami peningkatan 8 persen per tahun.

Pangan sumber protein lainnya dapat bersumber dari pangan nabati, yaitu kacang-kacangan. Pangan sumber protein nabati yang paling banyak dikonsumsi penduduk Indonesia yaitu komoditas kedelai termasuk olahannya. Selama tahun 2010-2014, konsumsi kedelai mengalami peningkatan rata-rata 0,6 persen per tahun. Tingginya konsumsi kacang kedelai dalam pola konsumsi pangan penduduk terutama berasal dari konsumsi olahan kedelai (tempe dan tahu). Jenis kacang-kacangan lain yang dikonsumsi penduduk yaitu kacang tanah dan kacang hijau, namun jumlah yang dikonsumsi kurang dari satu kilogram setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, setiap individu harus mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Perkembangan selama lima tahun terakhir, penduduk lebih dominan mengonsumsi sayuran dibanding buah-buahan.

Meskipun rata-rata konsumsi 2010-2014 terjadi penurunan konsumsi untuk sayuran dan buah sebesar 0,8 persen dan 0,1 persen, namun pada tahun 2013-2014 terdapat peningkatan konsumsi sayuran sebesar 4,8 persen dan buah sebesar 12,1 persen.

Sejalan dengan itu, kelompok minyak dan lemak, buah biji berminyak serta gula, menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Namun demikian, konsumsi pangan tersebut harus terus ditingkatkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1.1.3.4 Perkembangan Keamanan Pangan Segar

Hak atas pangan, termasuk pangan segar yang aman merupakan salah satu hak azasi manusia. Hal ini telah disepakati dalam FAO/WHO *International Conference on Nutrition* di Roma pada tahun 1992. Gambaran kondisi keamanan pangan segar di peredaran dapat diketahui dari hasil pengujian keamanan pangan segar yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian residu pestisida, mikroba dan logam berat.

Berdasarkan pengujian residu pestisida di laboratorium yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, diperoleh informasi bahwa kandungan residu pestisida yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada pangan segar mengalami tren yang meningkat. Pangan segar yang tidak memenuhi syarat sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 adalah 38,89 persen, 5,56 persen, 12,50 persen, 13,89 persen, 15,91 persen, 33,33 persen, 55,0 persen dan 22,50 persen. Pangan segar tidak memenuhi syarat, dikarenakan mengandung residu pestisida yang dilarang atau di atas ambang batas. Standar yang digunakan dalam menentukan apakah contoh memenuhi syarat atau tidak adalah SNI 7313 : 2008, *Codex Alimentarius* dan Permentan Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas.

Kondisi keamanan pangan segar dari aspek cemaran mikroba juga mengalami kecenderungan peningkatan pangan segar yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pengujian di laboratorium terhadap cemaran *Escheria coli* (*E. Coli*) sejak tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan bahwa persentase secara berturut-turut sebesar 29,33 persen, 37,50 persen dan 48,75 persen.

Pada tahun 2010, jumlah total contoh yang diujikan sebanyak 75 contoh dan 22 contoh (29,33 persen) diantaranya terhadap TMS *E. coli*. Sedangkan pada tahun 2011 adalah 30 contoh (37,50 persen) dari 80 contoh terdeteksi mengandung cemaran mikroba *E. coli* di atas batas maksimum yang diizinkan. Jumlah tersebut meningkat lagi pada tahun 2012, dengan 80 contoh terdeteksi 39 contoh (48,75 persen) TMS *E. coli*. Cemaran *E. coli* terkait erat dengan praktek sanitasi dan hygiene pada proses produksi, penanganan pasca panen, dan distribusi.

Berdasarkan jenis bahan pangannya, komoditi sayuran yang tidak memenuhi syarat lebih banyak daripada buah-buahan. Selama kurun waktu 2010-2012 contoh sayuran yang TMS dibandingkan dengan total contoh, yang TMS meningkat dari 29,3 persen pada tahun 2010 menjadi 46,3 persen pada tahun 2012 sehingga ada peningkatan sebesar 17 persen.

Adanya peningkatan jumlah TMS *E.coli* dari tahun 2010 – 2012 pada sayur yang beredar di tingkat pedagang ini harus menjadi perhatian bersama, apalagi beberapa sayur di Indonesia tersebut ada yang langsung dikonsumsi dalam bentuk mentah. Peningkatan TMS *E.coli* ini mengindikasikan penanganan pangan segar dari hulu (kebun) sampai hilir (pedagang retail) belum menerapkan praktek sanitasi dan hygiene yang benar.

Kondisi keamanan pangan dari aspek cemaran logam berat (merkuri Hg, arsen As, cadmium Cd dan timbale Pb) secara umum masih memenuhi syarat. Jumlah contoh yang diujikan pada tahun 2010 sebanyak 75 contoh. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2012, jumlah contoh yang diujikan sebanyak 80 contoh. Dari contoh pangan segar yang diujikan sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan hasil bahwa sebagian besar contoh tidak terdeteksi. Dari sebagian kecil logam berat yang terdeteksi tersebut, kadarnya masih di bawah ambang batas. Standar yang digunakan adalah SNI 7387 : 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat. Namun demikian, jumlah contoh pangan segar yang terdeteksi logam beratnya meningkat sejak tahun 2010 hingga 2012.

Dilihat dari persentase contoh yang terdeteksi logam berat sejak tahun 2010 hingga 2012, maka merkuri (Hg) merupakan jenis logam berat yang paling banyak terdeteksi. Pada tahun 2010, Hg tidak satu pun terdeteksi pada contoh pangan segar. Namun pada tahun 2011, Hg terdeteksi pada 8 contoh pangan segar, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 11 contoh. Untuk logam berat jenis lainnya, yakni Cd, As dan Pb, hanya terdeteksi pada sedikit contoh pangan segar.

Pencemaran logam berat dapat terjadi pada lingkungan daerah yang bermacam-macam, meliputi darat, udara dan air. Pencemaran udara oleh logam berat sangat erat kaitannya dengan sifat-sifat logam itu sendiri. Pencemaran udara biasanya terjadi pada proses-proses industri yang menggunakan suhu tinggi. Logam berat seperti Hg, As, Cd dan Pb adalah logam yang sangat mudah menguap. Pencemaran logam berat di darat dan air banyak dikaitkan dengan pembuangan limbah dari industri yang penggunaan logam secara tidak terkontrol.

1.1.4 Pengelolaan Cadangan Pangan Nasional

Cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat yang dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat. Cadangan pangan nasional juga dapat dimanfaatkan untuk kerjasama internasional dan bantuan pangan luar negeri. Cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi.

1.1.4.1 Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan pangan pemerintah pusat selama ini dikelola oleh Perum BULOG berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2012. Pada Diktum 5 huruf b diinstruksikan Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerja sama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan laporan s/d Desember 2014, data pemanfaatan CBP tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah (Ton) Tahun 2010-2014

URAIAN	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Stok Awal	514.649	460.357	378.449	431.277	368.976
Tambahan CBP	-	155.039	266.667	-	-
Pemanfaatan CBP: Bantuan darurat/bencana	14.864	14.992	13.322	13.770	11.378
Pengendalian Harga Beras (OPM)	39.428	221.955	200.518	40.007	75.515
OPK – CBP Raskin	-	-	-	-	30.825
Total Pemanfaatan	54.292	236.946	213.840	53.777	117.719
Stok Akhir	460.357	378.449	431.277	377.499	251.257

Sumber: Perum BULOG, 2014

Pada tahun 2011, terjadi penurunan stok akhir sebesar 18 persen dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pemanfaatan stok CBP untuk mengendalikan gejolak harga yang sangat tinggi sehingga dikeluarkan stok sebesar 221.955 ton lebih tinggi 463 persen dari tahun 2010. Pada tahun 2011, Indonesia melakukan impor sebesar 155.039 ton sehingga stok akhirnya menjadi 378.449 ton. Penyaluran CBP untuk operasi pasar (OP) pada tahun 2012 sebesar 200.517 ton, sehingga stok akhir CBP

sampai bulan November 2013 sebesar 377.499 ton atau mengalami penurunan stok sebesar 12,47 persen dibandingkan stok akhir tahun 2012. Hal ini disebabkan tidak adanya tambahan CBP pada tahun 2013.

Pemanfaatan CBP tahun 2013 selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk kegiatan kerjasama internasional yaitu melalui pemberian bantuan pada korban bencana alam Topan Bopha di Filipina sebesar 1.700 ton. Stok akhir CBP pada tahun 2014 sebesar 251.257 ton telah dimanfaatkan untuk operasi pasar khusus (OPK) dan OP hingga Maret 2015.

Pada tataran regional, pemerintah Indonesia juga memiliki tanggungjawab untuk mengalokasikan cadangan pangan dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian APTERR (*ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve*) yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat pangan di Kawasan ASEAN dan 3 (tiga) Negara mitra, Jepang, China dan Korea Selatan. Pengalokasiannya telah dilaksanakan sejak tahun 2013.

1.1.4.2 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan salah satu upaya dalam pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi telah dilaksanakan di 24 provinsi atau sekitar 72,79 persen dari jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi di 24 provinsi tersebut sebesar 3.486,37 ton beras dengan total pemanfaatan beras cadangan pangan pemerintah provinsi di 24 provinsi sebanyak 313,18 ton.

Sementara itu untuk membangun Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada tahun 2012 telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Pertanian untuk pembangunan gudang cadangan pangan. Sebanyak 125 kabupaten/kota atau 33 persen dari total kabupaten penerima telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 tersebut, dan sebanyak 96 kabupaten diantaranya telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten. Selain itu, terdapat 29 kabupaten/kota yang mengelola cadangan pangan pemerintah melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti Bulog, Swasta, Gapoktan, dan lain-lain.

1.1.4.3 Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat

Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok melalui dana Bansos.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk: (a) meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat karena produksi tidak merata sepanjang tahun; (b) menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan dan (3) sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi darurat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 telah melakukan kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat secara kumulatif sebanyak 3.106 unit, yang difasilitasi melalui dana DAK untuk pembangunan fisik lumbung dan dana APBN dekonsentrasi untuk pengisian lumbung sebagai stimulan bagi kelompok dalam pengembangan lumbungnya. Pembangunan lumbung tersebut tersebar pada 32 provinsi.

1.1.5 Harga Pangan

1.1.5.1 Perkembangan Harga Pangan Tingkat Konsumen

Berdasarkan pemantauan perkembangan harga pada 12 (dua belas) komoditas pangan strategis tingkat konsumen tahun 2010-2014, terlihat bahwa:

- 1) Selain terigu, seluruh komoditas pangan strategis mengalami peningkatan harga berkisar 4,55-23,43 persen, dengan peningkatan terkecil adalah komoditas gula, dan terbesar adalah bawang merah, sedangkan terigu mengalami penurunan rata-rata 6,39 persen.

- 2) Terdapat 5 (lima) komoditas yang selalu mengalami peningkatan harga setiap tahun, yaitu: (1) beras umum, rata-rata 9,47 persen; (2) beras termurah, rata-rata 9,06 persen; (3) daging sapi, rata-rata 12,34 persen; (4) gula pasir, rata-rata 4,55 persen; (5) telur ayam, rata-rata 8,03 persen. Sedangkan 7 (tujuh) komoditas lainnya mengalami fluktuasi harga (naik atau turun) setiap tahunnya.
- 3) Berdasarkan perhitungan *coefisien varian (cv)* harga masing-masing komoditas, terlihat bahwa sebagian besar komoditas pangan strategis cukup stabil harganya (batasan besaran *cv* tergantung komoditas), yaitu: (1) beras umum 3,44 persen; (2) beras termurah 3,48 persen; (3) daging ayam ras 7,49 persen; (4) daging sapi 3,91 persen; (5) minyak goreng curah 5,29 persen; (6) gula pasir 2,93 persen; (7) terigu 0,72 persen; (8) kedelai 2,58 persen; dan (9) telur ayam 6,14 persen. Sedangkan 3 (tiga) komoditas lainnya sangat berfluktuasi bahkan sempat bergejolak di masyarakat, yaitu: (1) cabe rawit 33,1 persen; (2) cabe merah 35,28 persen; dan (3) bawang merah 21,01 persen.

Tabel 5. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2010 – 2014

Tahun	Beras		Daging Ayam Ras	Daging Sapi	Minyak Goreng Curah	Gula	Terigu	Kedelai	Telur Ayam	Cabe Merah	Bw Merah
	Umum	Murah									
2010	8.011	6.430	23.897	62.993	12.029	10.090	7.501	8.702	13.471	23.299	16.852
2011	9.304	7.385	23.749	66.853	12.996	10.144	7.537	8.627	15.023	23.701	19.239
2012	10.435	8.289	26.319	76.664	13.983	11.343	7.506	8.845	16.204	23.723	14.646
2013	10.857	8.587	29.841	92.843	13.233	11.874	7.597	9.604	17.676	33.853	36.318
2014	11.460	9.065	29.421	99.745	14.801	12.012	9.442	11.355	18.320	30.829	20.136
Pertb/t h (%)	9,47	9,06	5,54	12,34	5,53	4,55	6,39	7,12	8,03	8,90	23,43
Rata2 CV	3,44	3,48	7,49	3,91	5,29	2,93	0,72	2,58	6,14	35,28	21,01
Target CV	≤5%	≤5%	≤10%	≤10%	≤5%	≤5%	≤10%	≤10%	≤10%	≤25%	≤25%

Sumber: BPS

1.1.5.2 Perkembangan Harga Gabah Tingkat Petani

Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi bangsa dan negara, karena merupakan komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani Indoensia. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah

ditingkat petani. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang sudah diterbitkan sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2002 sampai 2012. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.

Berdasarkan pengamatan dan monitoring perkembangan harga gabah di tingkat petani selama tahun 2010-2014, terlihat bahwa:

- 1) Harga gabah (GKP) di tingkat petani selalu berada di atas HPP, yaitu pada kisaran 18,28-36,17 persen di atas HPP dengan harga rata-rata antara Rp 3.123/kg dan Rp 4.246/kg, sedangkan HPP berkisar Rp 2.640/kg–Rp 3.300/kg.
- 2) Kenaikan harga HPP selama periode 2010-2014 sebesar 6,25 persen per tahun berdampak positif dalam meningkatkan harga aktual GKP petani, sehingga dapat menambah keuntungan usahatani tanaman padi.
- 3) *Coefisien varian (cv)* harga gabah di tingkat petani sejak tahun 2010-2014 berkisar 5,22-9,59 persen, dengan nilai terbesar pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2013. Dengan laju pertumbuhan sebesar 8,10 persen, nilai *cv* tersebut menunjukkan kondisi harga gabah di tingkat petani cukup stabil.

Tabel 6. Perkembangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Petani Tahun 2010 – 2014

Tahun	HPP GKP ¹⁾ (Rp/Kg)	Harga GKP di Petani ²⁾ (Rp/Kg)	Harga Petani Vs HPP		CV
			GKP	%	
2010	2.640	3.123	483	18,28	8,04
2011	2.640	3.595	955	36,17	9,59
2012	3.300	3.948	648	19,63	5,24
2013	3.300	4.005	705	21,38	5,22
2014	3.300	4.246	946	28,65	5,92
Pertb/th (%)	6,25	8,10		23,76	

Sumber: ¹⁾ Inpres Kebijakan Perberasan

²⁾ BPS

Salah satu inisiasi BKP untuk menjaga stabilitas harga GKP ditingkat petani adalah melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM). Kegiatan P-LDPM tersebut dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani/kelompoktani/Gapoktan padi dan jagung terhadap jatuhnya harga pada saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan pada saat paceklik. Badan Ketahanan Pangan menyalurkan dana Bantuan Sosial dari APBN kepada Gapoktan untuk memberdayakan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan dari anggotanya sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun di wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Melalui

penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik.

Selama tahun 2010-2014 kegiatan P-LDPM telah berhasil menumbuhkan Gapoktan sebanyak 836 Gapoktan. Tahun 2010 sebanyak 204 Gapoktan, tahun 2011 sebanyak 235 Gapoktan, tahun 2012 sebanyak 281 Gapoktan, tahun 2013 sebanyak 78 Gapoktan dan tahun 2014 sebanyak 38 Gapoktan. Berdasarkan Kajian Evaluasi Dampak P-LDPM Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk Bansos P-LDPM terbukti dapat menjaga stabilitas harga pangan ditingkat petani.

Tabel 7. Harga Rata -rata Pembelian Gapoktan Penguatan-LDPM Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Rata-Rata Harga Pembelian (Rp/Kg)					
		GKP	GKS	GKG	Beras	Jagung	
						Tongkol	Pipilan
1	2010	2.902	3.209	3.372	5.544	1.439	2.058
2	2011	3.291	3.714	3.831	6.410	2.125	2.724
3	2012	3.669	4.046	4.215	7.198	1.860	2.611
4	2013	3.965	4.548	4.995	7.571	1.677	2.875
5	2014	3.993	4.310	5.868	7.858	2.328	2.856

Sumber: BKP, Kementan

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa harga GKP ditingkat petani anggota Gapoktan P-LDPM diatas HPP yaitu rata-rata Rp 3.564. Selain menjaga harga ditingkat petani, dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi kelangkaan pangan. Berpengaruh positif dalam membangun perspektif anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis. Dari kegiatan yang diinisiasi Badan Ketahanan Pangan melalui penguatan LDPM, ternyata tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, tetapi para petani dan Gapoktan telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah memperoleh dampak ikutan, berupa mata pencaharian. Semua ini, tentu berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

1.1.5.3 Perbandingan Harga Beras Dalam Negeri dengan Harga Internasional

Dari hasil pemantauan harga beras di dalam negeri (beras termurah) dengan harga beras internasional (Thai 5%) pada tahun 2010-2014 (Tabel 8), terlihat bahwa:

- 1) Harga beras domestik jauh lebih tinggi dibanding harga beras Thai 5%. Perkembangan harga beras dalam negeri jauh lebih stabil dibanding beras Thai 5%, yang ditunjukkan oleh rata-rata nilai cv harga beras dalam negeri 3,48 persen, sedang harga beras Thai sebesar 6,17 persen. Begitu juga apabila dilihat rincian tiap tahun, nilai cv beras dalam negeri berkisar 1,13-6,81 persen, sedang cv beras Thai 5% berkisar 4,89-11,77 persen.
- 2) Harga beras Thai 5% yang jauh lebih rendah tidak mempengaruhi harga beras dalam negeri, yang ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan harga beras Thai 5% yang turun 2,98 persen per tahun, sedang harga beras dalam negeri naik 9,06 persen per tahun.

Tabel 8. Perkembangan Harga Beras Paritas Internasional Tahun 2010-2014

Tahun	Paritas Impor (Rp/kg)			
	Thai 5%	Thai 15%	Viet 5%	Viet 15%
2010	5,943	5,684	5,276	5,099
2011	6,237	6,050	5,892	5,711
2012	6,951	6,788	5,600	5,392
2013	6,699	6,576	5,647	5,449
2014	6,642	6,394	8,492	6,396
Rerata	6,494	6,299	6,181	5,610
Pertb/th (%)	2.98	3.19	14.49	6.21
CV (%)	6.17	6.95	21.20	8.75

Sumber: BPS

1.2 Potensi, Permasalahan dan Tantangan

1.2.1 Potensi

1.2.1.1 Ketersediaan Sumber Daya Alam

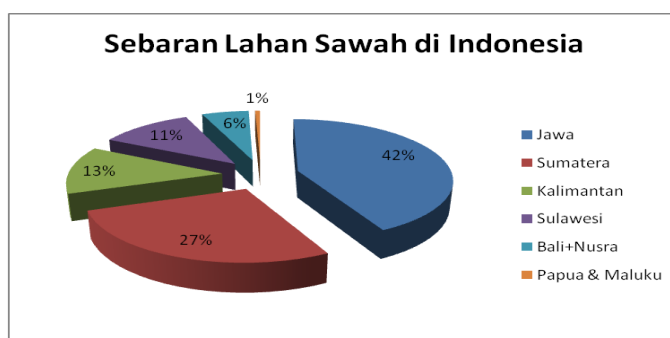
Indonesia mendapat anugrah kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan sumber daya alam sangat penting didayagunakan untuk pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Berbagai potensi sumber daya alam tersebut diantaranya adalah sumber daya lahan, air dan keanekaragaman hayati.

A. Sumber Daya Lahan

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan. Budidaya tanaman penghasil pangan dilakukan di atas lahan yang tersedia sehingga beragam pangan dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Indonesia memiliki potensi lahan untuk budidaya yang cukup luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kawasan budidaya yang berpotensi untuk pertanian seluas 101 juta ha, dan telah menjadi areal budidaya pertanian seluas 47 juta ha. Dengan demikian, masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.

Khusus untuk lahan sawah, Indonesia memiliki areal sawah seluas 8.132.642 ha yang terdiri dari 54 persen sawah beririgasi (seluas 4.417.582 ha) dan 46 persen non irigasi (seluas 3.714.764 ha). Lahan sawah tersebut tersebar diseluruh pulau besar di Indonesia, dengan lahan sawah yang terluas di pulau jawa yaitu 3.444.579 ha atau sekitar 42 persen. Pola sebaran lahan sawah di Indonesia seperti pada gambar dibawah ini.



Grafik 2. Sebaran Lahan Sawah di Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan

B. Sumber Daya Air

Sumber daya air menjadi faktor kunci untuk pembangunan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menghasilkan produk pangan. Jika air tidak tersedia maka produksi pangan baik yang berasal dari tanaman maupun dari ternak akan terhenti.

Kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air (irigasi) dalam skala besar di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1936. Pada masa setelah kemerdekaan, pembangunan infrastruktur sumber daya air secara menyeluruh selanjutnya dimulai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Lima Tahun – I (REPELITA I) periode 1968/1969 – 1973/1974. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara cepat selama pelaksanaan REPELITA I hingga VI. Pembangunan infrastruktur di sektor sumber daya air ini telah berhasil meningkatkan produksi pangan hingga mencapai swasembada pangan pada tahun 1980-an.

Dalam rangka peningkatan sumber daya air di Indonesia, masih banyak diperlukan pembangunan bendungan, waduk, dan sistem jaringan irigasi yang handal untuk menunjang kebijakan ketahanan pangan pemerintah. Di samping itu, untuk menjamin ketersediaan air baku, tetap perlu dilakukan normalisasi sungai dan pemeliharaan daerah aliran sungai yang ada di beberapa daerah. Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Wilayah Sungai tersebut perlu didekati dengan suatu rencana terpadu dari hulu sampai hilir yang dikelola secara profesional. Untuk itu perlu dikembangkan teknologi rancang bangun Bendungan Besar, Bendung Karet, termasuk terowongan, teknologi Sabo, sistem irigasi maupun rancang bangun pengendali banjir. Saat ini terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan yaitu 62 DAS rusak dari total 470 DAS, sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air. Saat ini jaringan irigasi terbangun mencapai 6,77 juta ha (1,67 juta ha belum berfungsi), dan jaringan irigasi rawa 1,8 juta ha yang berfungsi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

C. Sumber Daya Keanekaragaman Hayati

Indonesia dikenal sebagai Negara “*bio-diversity*”, dengan potensi plasma nutfah tanaman dan hewan yang beranekaragam dan dalam jumlah yang besar. Dalam hal kekayaan keragaman hayati, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan keragaman hayati ke-2 setelah Brasilia. Indonesia mempunyai sekitar 800 spesies tanaman sumber bahan pangan, 100 spesies tanaman obat-obatan dan beribu-ribu jenis algae. Sementara itu jenis-jenis tanaman yang sudah teridentifikasi pemanfaatannya seperti pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Jenis-jenis tanaman berdasarkan pemanfaatannya

No	Kelompok Tanaman	Jumlah Spesies
1	Sumber karbohidrat	77
2	Sumber minyak/lemak	75
3	Kacang-kacangan	26
4	Buah-buahan	389
5	Sayur-sayuran	228
6	Bahan minuman	40
7	Rempah-rempah	110

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementan

Keragaman hayati tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan sangat potensial dalam mendukung ketersediaan pangan yang beranekaragam. Potensi sumber pangan lokal yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas pangan tertentu seperti beras. Beberapa pangan lokal alternatif cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong, dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah, bahkan memiliki kelebihan dibandingkan beras.

D. Sumber Daya Manusia

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi *labor supply* di sektor pertanian pangan. Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumahtangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Penduduk yang besar di suatu wilayah harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian, peningkatan kapasitas penduduk menjadi modal (*human capital*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pangan bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan dunia.

Disamping itu, adanya kearifan lokal pangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dalam mengembangkan warisan sistem pertanian dan pangan, makin mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan (beras aruk, tiwul, binthe, papeda dan lainnya).

1.2.1.2 Inovasi dan Teknologi

Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian, sangat penting artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan. Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan rawan pangan. Selain itu juga memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik.

Beberapa kegiatan Badan Ketahanan Pangan yang dianggap cukup berhasil dan diapresiasi dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi antara lain: (1) bersama World Food Programme (WFP) mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) untuk menyediakan informasi bagi penentu kebijakan, sehingga dapat diputuskan rencana program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi. Melalui FSVA dapat diketahui daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan dan faktor-faktor penyebabnya; (2) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, antara lain membangun kebun bibit dengan budidaya sistem vertikultur, potisasi, tabulampot, serta diversifikasi tanaman untuk menyediakan beragam pangan; (3) Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan, untuk mengubah bentuk asli pangan lokal dan memperkaya nilai gizinya sehingga meningkatkan citra pangan lokal (beras analog, beras cerdas); serta (4) Pengawasan uji lab keamanan pangan segar menggunakan *rapid test kit*.

Isu ketahanan pangan merupakan isu global, sehingga kesempatan mendapatkan transfer teknologi dan informasi (*technical assistance*) dalam kerangka kerjasama internasional sangat terbuka.

1.2.1.3 Kebijakan Pangan Nasional

UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Sejalan dengan Undang-Undang Pangan tersebut, pemerintah baru dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menempatkan pangan

sebagai salah satu agenda penting pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019 bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumberdaya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, serta 27 Peraturan/Surat Edaran Gubernur di 27 Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dapat segera terwujud manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

1.2.1.4 Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kelembagaan ketahanan pangan nasional dan daerah merupakan pendorong dan penggerak dalam pencapaian sasaran program ketahanan pangan. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2015 telah terbentuk unit kerja struktural ketahanan pangan sebanyak 34 unit kerja struktural di provinsi dan 479 unit kerja struktural di kabupaten/kota. Selain unit kerja struktural, agar lebih meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian program ketahanan pangan dilakukan melalui kelembagaan fungsional Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Jumlah kelembagaan DKP yang telah terbentuk 33 DKP provinsi dan 437 DKP kabupaten/kota.

Unit kerja struktural ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota memiliki struktur kelembagaan yang bervariasi, baik dalam bentuk Badan, Dinas, Kantor, Subdinas, Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis, Sekretariat dan Seksi setingkat Eselon II,III atau IV, baik yang berdiri sendiri maupun unit kerja yang digabungkan dengan unit lain atau berada di bawah dinas teknis.

Berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan desa dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya).

1.2.2 Permasalahan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

1.2.2.1 Sistem Pertanian Pangan

Sistem pertanian pangan yang dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai. Bila diukur dari tingkat pendapatan per kapita petani selama kurun waktu 2010-2014, mengalami peningkatan dengan indikasi pertumbuhan antara 5,64 persen dan 6,20 persen. Namun demikian, secara nominal tingkat pendapatan per kapita petani tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2014, tingkat pendapatan per kapita pertanian arti luas dan sempit masing-masing sekitar Rp 9.032/kapita/hari dan Rp 7.966/kapita/hari. Hal ini disebabkan biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha di Jawa dan 0,5 ha di luar Jawa).

1.2.2.2 Dinamika Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (1,39%/tahun) mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga membutuhkan ruang dan energi yang lebih besar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, perluasan industri, perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat. Dengan demikian, pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk perlu dilakukan secara konsisten.

Selain laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, faktor kebiasaan penduduk yang hanya mengonsumsi jenis pangan tertentu, misalnya beras, akan memberikan tekanan yang berat terhadap penyediaan pangan tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) yang berbasis sumber pangan lokal agar terus dilakukan.

1.2.2.3 Konversi Lahan

Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif, selain itu juga adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan. Pemanfaatan lahan pertanian pangan ke pertanian non pangan (bio energi, pakan) merupakan bentuk kompetisi pemanfaatan lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur pemanfaatan lahan pertanian ini secara bijaksana.

Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu hektar per tahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru, sehingga produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas yang akan berdampak pada kelangkaan pangan dan berpotensi menimbulkan kerawanan pangan.

1.2.2.4 Degradasi Air

Kebutuhan akan sumber daya air terus meningkat, disisi lain ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Saat ini telah terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk pertanian. Disisi lain akibat terjadinya perubahan ekosistem seperti pembabat hutan, perubahan lahan pertanian menjadi industri dan penurunan serta perluasan dan peningkatan fungsi kota menyebabkan terjadinya *run off* yang besar dan tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan secara arif dan bijaksana untuk mencegah terjadinya degradasi kuantitas dan kualitas air.

1.2.2.5 Keterbatasan Infrastruktur

Kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di perdesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan nasional. Pengembangan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan, dapat mengakibatkan terganggunya transportasi bahan pangan dan akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Selain itu juga mempertinggi proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan.

1.2.2.6 Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga pangan yang ditunjukkan oleh *Coefficient of Variation (cv)* perlu diantisipasi karena nilai *cv* yang tinggi mencerminkan harga jual pangan sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi inflasi. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan dunia, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu.

1.2.2.7 Keamanan Pangan

Di berbagai daerah telah terjadi beberapa kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya. Hal ini antara lain dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran para pengusaha waralaba (ritel) untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu, belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas, standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanannya masih mudah masuk ke dalam negeri, belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar serta koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

1.2.2.8 Manajemen Organisasi Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah yang merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga dan individu masih belum optimal. Beberapa penyebabnya antara lain adalah sering terjadinya rotasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) masih belum optimal, serta komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan.

1.2.3 Tantangan

1.2.3.1 Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

1.2.3.2 Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah yang terisolir dan wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

1.2.3.3 Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan nasional. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Laporan FAO menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang cukup tajam yaitu dari 75 persen sampai 200 persen. Dalam tiga tahun terakhir, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Indonesia harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan

dalam negeri menjadi mutlak dilakukan. Selain itu juga agar tetap menjaga stabilitas ekonomi dan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan nasional ke depan juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Indonesia untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang.

Dalam menghadapi perekonomian global dan perdagangan bebas, Indonesia harus mampu meningkatkan dan menguatkan kapasitas sumber daya pangan, terutama sumber daya manusia sebagai pelaku usaha pangan. Dengan demikian, diharapkan terjadi: 1) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi pangan, 2) penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, 3) perluasan jaringan pemasaran, serta 4) peningkatan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran.

1.2.3.4 Permasalahan Gizi (*Malnutrition*)

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan *overweight* dan obesitas. Pada negara berkembang seperti Indonesia, akses transportasi dan penggunaan mesin dalam rumah tangga serta perkantoran telah merubah gaya hidup menjadi pola hidup yang tidak berpindah-pindah atau kurang gerak.

Indonesia sedang mengalami permasalahan gizi (*malnutrition*) sebagai masalah kesehatan umum saat ini, walaupun prevalensi kurang gizi pada anak usia dibawah 5 tahun selama periode 2005-2013 telah berkurang dari 24,5 persen menjadi 19,6 persen. Prevalensi anak pendek (*stunting*) usia dibawah 5 tahun juga menurun dari 36,85 pada tahun 2007 menjadi 35,6 persen pada tahun 2010, tetapi naik menjadi 37,2 persen pada tahun 2013. Kelebihan berat badan (*overweight*) dan obesitas juga menjadi salah satu masalah pada anak usia dibawah 5 tahun dengan prevalensi sekitar 11,9 persen pada tahun 2013.

1.2.3.5 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan dalam negeri dan pengelolaan stok pangan nasional. Situasi ini diperparah dengan aksi spekulasi baik di daerah produsen yang surplus maupun daerah yang biasanya menjadi negara pengimpor beras. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan dari dalam negeri yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

1.2.3.6 Kebutuhan Pangan untuk kesehatan

Mengonsumsi makanan tidak lagi semata mempertimbangkan kelezatan dan penampilannya saja, tetapi juga yang terpenting adalah nilai gizi dan pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh. Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan cita rasa memuaskan, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Bahkan dituntut mampu menyembuhkan suatu penyakit. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Bahkan, semakin dewasa ini masyarakat juga mengharapkan adanya dampak positif pangan yang dikonsumsinya terhadap kesehatan. Ini berarti bahwa pangan harus bersifat fungsional.

Pasar bebas industri pangan mancanegara memberikan tantangan kepada industri pangan domestik. Membludaknya produk pangan impor yang berkualitas menjadi bukti bahwa fenomena pasar bebas semakin mendominasi. Sebagai konsekuensi logis untuk memenangkan persaingan, industri pangan harus memperhitungkan dan memberlakukan sistem jaminan pengendalian mutu dan kualitas pangan. Kualitas mutu yang bagus dan terjamin akan mendorong peningkatan produksi produk pangan, kemudian meningkatkan nilai tambah dan kesempatan kerja. Tantangan industri pangan tidak jauh dari pemenuhan kemampuan gizi konsumen. Hal ini karena untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

BADAN KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2015-2019

2.1 Visi Badan Ketahanan Pangan

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”

Kata-kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Pokok-pokok Visi Badan Ketahanan Pangan

Pokok-pokok Visi	Makna Visi
Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
Kemandirian Pangan	Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat

2.2 Misi Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*lead institution*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut agar dapat mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

2.3 Tujuan Badan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi pangan;
4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
5. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

2.4 Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
5. Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu.

Untuk melihat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKP tahun 2015-2019, dapat diperhatikan pada tabel 11.

Tabel 11. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan	1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam
		2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan	2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
	2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan	3. Memperkuat sistem distribusi pangan	3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
	3. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal	4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal	4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
	4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu	5. Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar	5. Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga; (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019).

Strategi yang akan dilakukan meliputi: (a) peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah. (b) peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, (c) perbaikan kualitas

konsumsi pangan dan gizi masyarakat, (d) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan, (e) peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan

3.2.1 Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, (c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.2.2 Strategi Badan Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk:
(a) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
5. Penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

1. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, melalui:
 - a. Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - b. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA);
 - c. Implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta intervensi dan mitigasi penanganan rawan/kurang Pangan;
 - d. Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan;
 - e. Kajian Responsif dan Antisipatif;
 - f. Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil, melalui:
 - a. Pemberdayaan petani kecil dan gender;
 - b. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan;
 - c. Pengembangan pemasaran dan produksi pertanian;
3. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan, melalui:
 - a. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM);
 - b. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat (LPM);
 - c. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI);
 - d. Pemantauan pasokan harga pangan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
 - e. Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan serta tindak lanjut gejolak harga pangan;

- f. Kajian Responsi dan Antisipatif Distribusi Pangan;
 - g. Kajian Distribusi Pangan.
4. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, melalui:
- a. Pemberdayaan pekarangan pangan;
 - b. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan lokal kepada aparat dan masyarakat;
 - c. Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - d. Analisis pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - e. Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal UMKM dan rumah tangga;
 - f. Pengawasan keamanan dan mutu pangan.

3.2.3 Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan

Memperhatikan butir-butir kebijakan ketahanan pangan di atas dan mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan lintas pelaku dan wilayah, maka dirumuskan "**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**". Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan beberapa output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan beserta sub kegiatannya diuraikan berikut ini :

3.2.3.1 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat / *Smallholder Livelihood Development (SOLID)*.

Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 6 (enam) sub kegiatan, yaitu: (1) Analisis Neraca Bahan Makanan; (2) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; (3) Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; (4) Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA); (5) Kawasan Mandiri Pangan; dan (6) Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan.

Sedangkan untuk mencapai sasaran output kedua, ada 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan *International Food for Agricultural Development (IFAD)* di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara, yaitu: (1) Pemberdayaan petani kecil dan gender; (2) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran; (3) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan; dan (4) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID.

3.2.3.2 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia; (2) Lembaga distribusi pangan masyarakat; (3) Lumbung pangan masyarakat; (4) Panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN; (5) Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan; (6) Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan; dan (7) Kajian Distribusi Pangan.

3.2.3.3 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu: (1) Pemberdayaan pekarangan pangan; (2) Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan; (3) Gerakan Diversifikasi Pangan; (4) Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan; (5) Model pengembangan pangan pokok lokal; dan (6) Pengawasan keamanan dan mutu pangan;

3.2.3.4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan operasional kantor.

Sasaran output kegiatan adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Badan Ketahanan Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 4 (empat) sub kegiatan, yaitu: (1) Perencanaan, penganggaran, dan kerja sama ketahanan pangan; (2) Pelayanan keuangan dan perlengkapan; (3) Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan; (4) Penanganan organisasi, kepegawaian, humas, tata usaha, dan hukum.

Sedangkan untuk mencapai sasaran output kedua, hanya ada satu sub kegiatan, yaitu: koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.2.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.

Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait dengan pembangunan ketahanan pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran UU No.18/2012. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU No.18/2012. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus

diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di daerah, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang selama ini menjadi acuan, perlu ditinjau kembali agar substansi pengaturannya dapat diperluas sesuai amanat UU No.23/2014. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal, dan penanganan rawan pangan pada masyarakat miskin. Sementara itu, untuk memberikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015. Melalui kerangka regulasi ini, pelaksanaan kegiatan analisis ketahanan pangan dan program aksi ketahanan pangan dijelaskan di dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi aparat dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan juga dibutuhkan dukungan regulasi terkait, antara lain: perlindungan sumber daya pangan; perlindungan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan lain; penelitian dan pengembangan pangan; kelancaran distribusi pangan; harga dan pemasaran pangan; perdagangan pangan; perlindungan konsumen; dan pengendalian impor pangan; serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penanganan ketahanan pangan melibatkan lintas sektor, lintas waktu dan lintas pemangku kepentingan, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan mantap. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan mengamanatkan Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang membantu mengoordinasikan perumusan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketahanan pangan.

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 disusun sesuai dengan arahan UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU No.18/2012 tentang Pangan, dan memperhatikan agenda prioritas RPJMN 2015-2019 serta Permentan No.

19/HK.140/4/2015 tentang Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Secara lengkap kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan seperti ditampilkan pada **Lampiran Matrik Kerangka Regulasi**.

3.2.5 Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, untuk pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di tingkat pusat dibutuhkan kelembagaan ketahanan pangan. Sejalan dengan amanat tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan dibidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Pelaksanaan tugas diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip tata kelola yang baik tersebut meliputi manajemen di Badan Ketahanan Pangan mulai dari aspek perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan ketahanan pangan. Upaya untuk mencapai prinsip tata kelola yang baik diawali dengan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Badan Ketahanan Pangan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 (delapan) area perubahan meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*;
3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
8. *Mindset* dan *Cultural Set* Aparatur Badan Ketahanan Pangan, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Dalam rangka menunjang upaya pencapaian ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota telah terbentuk SKPD Ketahanan Pangan yang didasari

dengan semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien, efektif dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional yang dinamis. Dengan demikian, dituntut kinerja kelembagaan ketahanan pangan yang handal baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bentuk dan nama unit kerja yang menangani ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat beragam, seperti terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Bentuk Kelembagaan Ketahanan Pangan Seluruh Indonesia

Nama Lembaga	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
Lembaga Ketahanan Pangan	34	479	513
Badan Ketahanan Pangan/Kantor Ketahanan Pangan	20	156	176
Badan Ketahanan Pangan/Kantor Ketahanan Pangan dan (Unit Kerja Lain)	10	201	211
Dinas dan (Unit Kerja Lain)	4	114	118
Seksi/Sub Bagian/UPTD Ketahanan Pangan	-	8	8

Sumber : BKP, Kementan

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan kerja antara pusat dengan daerah adalah hubungan fungsional dalam pembangunan ketahanan pangan. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat aspek koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program diperlukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) pada berbagai tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Jumlah kelembagaan DKP saat ini meliputi 33 provinsi dan 437 kab/kota. Selain hubungan antar pemerintahan, juga dibutuhkan peran serta masyarakat dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam mencapai target pemantapan ketahanan pangan.

Terkait dukungan sumberdaya aparatur sipil negara, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh Aparatur Sipil Negara sebanyak 299 pegawai (data per tanggal 20 April 2015) dengan komposisi yang beragam. Untuk mengantisipasi kekurangan SDM yang ada terkait dengan perubahan lingkungan strategis, telah dilaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai melalui peta jabatan yang ideal berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan mengacu pada aplikasi e-formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Hasil penyusunan kebutuhan pegawai tahun 2015-2019 di Badan Ketahanan Pangan seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Kebutuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Tahun 2015–2019

2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan
(orang)					
342	385	439	503	587	Data e-formasi kebutuhan pegawai per tahun

Sumber : BKP, Kementan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, telah dilakukan: (a) program tugas belajar dan ijin belajar dengan biaya dari pemerintah, maupun biaya sendiri, kursus/pelatihan teknis aplikatif dan administratif, serta workshop/seminar; (b) pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya; (e) sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai Badan Ketahanan Pangan.

Sejalan dengan reformasi kepegawaian dibidang SDM aparatur, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mendorong aparatur agar lebih profesional dan kreatif dalam bentuk jabatan fungsional. Saat ini, Badan Ketahanan Pangan telah memiliki lima jabatan fungsional terdiri dari (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian; (2) Analis Pasar Hasil Pertanian; (3) Stasisisi; (4) Pranata Komputer; dan (5) Analis Ketahanan Pangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian serta tujuan pembangunan pertanian, sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pertanian dalam periode 2015-2019, adalah : (1) Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; (2) **Terjaminnya distribusi pangan**; (3) **Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi**; (4) **Meningkatnya konsumsi pangan lokal**; (5) **Stabilnya produksi cabe dan bawang merah**; (6) Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing; (7) Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergy; (8) Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani; (9) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (10) Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan; dan (11) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan sasaran strategis Kementerian Pertanian tersebut, target kinerja yang berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan nasional, yaitu (1) Terjaminnya distribusi pangan; (2) Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; (3) Meningkatnya konsumsi pangan lokal; dan (4) Stabilnya produksi cabe dan bawang merah. Target kinerja tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

4.1.1 Target Kinerja Program

Target kinerja “**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**” Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019, adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) lebih besar atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah;
4. Koefisien variasi pangan di tingkat konsumen (cv) dengan cv beras kurang dari 10%, cabe merah kurang dari 25%, bawang merah kurang dari 15% pada tahun 2019;

5. Konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kap/hr pada tahun 2019;
6. Konsumsi pangan hewani sebesar 225 kkal/kap/hr pada tahun 2019;
7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi sebesar 92,50 pada tahun 2019;
8. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras sebesar 6,23% pada tahun 2019;
9. Peningkatan produk pangan segar yang terdaftar dan/atau tersertifikasi sebesar 10%;
10. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji lebih besar atau sama dengan 80%.

Target kinerja program setiap tahun dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Target Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015–2019

No.	Rincian IKP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,52	89,71	92,04	94,25	96,32
2.	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/Tahun)	1	1	1	1	1
3.	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4.	Koefisien variasi pangan di tingkat konsumen (CV)					
	- Beras	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
	- Cabe Merah	≤ 29%	≤ 28%	≤ 27%	≤ 26%	≤ 25%
	- Bawang Merah	≤ 19%	≤ 18%	≤ 17%	≤ 16%	≤ 15%
5.	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150
6.	Konsumsi Pangan Hewani (kkal/kap/hr)	191	200	208	217	225
7.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5
8.	Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras (%)	5,54	5,70	5,87	6,05	6,23
9.	Peningkatan produk pangan segar yang terdaftar dan/atau tersertifikasi (%)	10	10	10	10	10
10.	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji (%)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80

Sumber: Badan Ketahanan Pangan

4.1.2 Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2015-2019 yang berupa output. Indikator kinerja kegiatan (IKK) tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Target Kinerja Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019

No	Rincian IKK	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1814	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan					
	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (Gapoktan)	358	241	248	90	135
	Jumlah lumbung pangan masyarakat (Unit)	1.724	1.628	800	1.492	1.492
	Jumlah lokasi panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN (Lokasi)	35	35	35	35	35
	Jumlah hasil pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan (Lokasi)	3	3	3	3	3
	Jumlah Usaha Pangan Masyarakat (UPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) (Gap/TTI)	20	1.000	2.000	3.000	5.000
	Jumlah kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan (Judul)	1	1	1	1	1
	Jumlah kajian distribusi pangan (Rekomendasi)	27	27	27	27	27
1815	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan					
	Jumlah hasil analisis neraca bahan makanan	35	35	35	35	35
	Jumlah lokasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (Lokasi)	456	456	456	456	456
	Jumlah hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan (Judul)	27	27	27	27	27
	Jumlah analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA)	35	1	1	1	1
	Jumlah kawasan mandiri pangan (Kawasan)	192	190	110	135	75
	Jumlah hasil pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan (Lokasi)	35	35	35	35	35
	Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender (KK)	33.600	33.600	33.600	33.600	0
	Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran (KK)	26.880	26.880	26.880	26.880	0
	Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan (Desa)	224	224	224	224	0
	Jumlah dukungan manajemen dan administrasi SOLID (Bulan Layanan)	12	12	12	12	0
1816	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan					
	Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (Desa)	4.410	2.894	1.306	2.612	2.612
	Jumlah pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan (Lokasi)	35	34	34	34	34

No	Rincian IKK	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (Lokasi)	35	35	35	35	35
	Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan (Rekomendasi)	35	35	35	35	35
	Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal (Unit)	27	29	27	27	27
	Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan (Rekomendasi)	65	86	106	126	146
1817	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan					
	Jumlah dokumen rencana program, anggaran dan kerja sama (Dokumen)	35	35	35	35	35
	Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan (Dokumen)	35	35	35	35	35
	Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program (Laporan)	35	35	35	35	35
	Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum (Dokumen)	3	3	3	3	3
	Jumlah perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan manajemen dan administrasi (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12
	Jumlah Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12

Sumber: BKP, Kementan

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBN, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah Daerah melalui APBD prov/kab/kota, keterlibatan swasta, perbankan (skim kredit dan kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan internasional. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan 2015-2019 yang dibiayai APBN, adalah prioritas nasional. Kebutuhan anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 adalah sebesar Rp 635,25 milyar. Sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp 1.439,90 milyar. Kebutuhan anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan kajian, analisis dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta pengembangan model pemberdayaan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat terutama di lokasi rentan ketahanan pangan. Rencana pendanaan tahunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Pendanaan APBN Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1814	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	107,26	285,41	466,02	675,59	1.081,80
1815	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	111,61	268,43	285,36	320,38	71,261
1816	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	132,89	125,71	98,52	138,60	149,08
1817	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	283,49	103,49	113,84	125,23	137,75
TOTAL		635,25	783,06	963,76	1.259,82	1.439,90

Sumber: BKP, Kementan

Secara lengkap target dan anggaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2015-2019 ditampilkan pada **Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan**.

BAB V

DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

Pembangunan ketahanan pangan nasional memiliki cakupan yang luas, sehingga tentunya akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya dapat diselesaikan dibawah kewenangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Untuk itulah diperlukan sinergi dan dukungan dari instansi terkait.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang berada di instansi lintas sektor dan diharmonisasikan sehingga tidak terdapat kebijakan yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Kebijakan pendukung yang ada juga harus dapat dioperasionalkan, sehingga rancangan mempercepat pemantapan ketahanan pangan nasional. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari instansi lain seperti pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga Terkait dalam Pembangunan Ketahanan Pangan

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	DUKUNGAN
1	Pemerintah Daerah	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan
2	Kementerian Dalam Negeri	Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan Daerah terutama terhadap retribusi daerah yang menekan harga dan daya saing produk pangan Kebijakan yang mendorong pemanfaatan dana desa ke arah pengembangan potensi desa di sektor pertanian pangan dan industri di pedesaan berbahan baku hasil pertanian
3	Kementerian Perindustrian	Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer dan olahan komoditas pertanian Fasilitasi pengolahan skala kelompok dalam rangka peningkatan pendapatan kelompok tani Mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan pangan berbasis kawasan pertanian

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	DUKUNGAN
4	Kementerian Perdagangan	Penetapan harga dan kelancaran distribusi pangan
		Fasilitasi pergudangan di tingkat desa dan resi gudang sebagai sarana stok manajemen pangan
5	Kementerian Perhubungan	Transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas pangan baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional
6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Menjadikan sentra komoditas pertanian utama sebagai basis pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan
7	Kementerian Koperasi dan UMKM	Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan usahatani menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, perdagangan maupun penyediaan aneka jasa, terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk produksi pertanian
8	Kementerian Keuangan	Mendorong dan menjaga stabilitas harga pangan melalui kebijakan fiskal yang tepat.
		Penyediaan dana untuk tenaga lapangan; penyuluh pertanian; pengawas benih; petugas karantina pertanian dan tenaga fungsional lainnya
9	Kementerian Agama	Kebijakan untuk memasyarakatkan program percontohan pembangunan pertanian melalui pengabdian masyarakat oleh pemuka agama
10	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	Pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal
11	Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Mengikutsertakan unsur-unsur dalam Perguruan Tinggi dalam pendampingan kelompok petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lainnya
12	Kementerian Kesehatan	Sosialisasi Pola Pangan Harapan yang mendukung diversifikasi konsumsi pangan serta pengawasan produk pangan yang aman
13	Kemenko Bidang Perekonomian	Koordinasi lintas kementerian/lembaga mendukung ketahanan pangan nasional
14	Perum Bulog	Melaksanakan kebijakan yang mendorong stabilisasi harga komoditas pangan strategis
		Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu bekerjasama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya.
		Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditas

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	DUKUNGAN
		strategis lainnya selain beras dalam rangka menjaga stabilitas harga
		Pembinaan sistem logistik ketahanan pangan di tingkat desa
15	Perguruan Tinggi	Peningkatan pembinaan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat
16	Kementerian Pertanian :	
	a. Ditjen Tanaman Pangan	Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi Sosialisasi/gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu sebagai alternatif sumber karbohidrat
	b. Ditjen Hortikultura	Peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan Sosialisasi/gerakan konsumsi sayur dan buah-buahan Dukungan benih/bibit sayuran dan buah untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan
	c. Sekretariat Jenderal	Perizinan sarana/prasarana promosi diversifikasi pangan
	d. Badan Litbang Pertanian	Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan Teknologi pengayaan gizi melalui fortifikasi pangan dan pengolahan pangan yang bergizi tinggi dan bernilai ekonomi Dukungan teknologi peningkatan produksi hasil pekarangan dan pangan lokal
	e. BPSDMP	Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan terkait dengan pola konsumsi yang B2SA Penurunan konsumsi beras dan peningkatan PPH agar masuk dalam buku pintar penyuluhan Dukungan pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan
	f. BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)	Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan Dukungan teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, termasuk pengayaan nilai gizi

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	DUKUNGAN
		pangan melalui fortifikasi pangan
	g. BPSBP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian)	Penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura
	h. BPPTPH (Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam mengelola pemanfaatan pekarangan
	i. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerepan Teknologi)	Adopsi teknologi pengolahan pangan (mesin penepungan, pembuatan mie) Dukungan teknologi tepat guna dalam kegiatan model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di daerah dengan menghasilkan mesin pengolahan beras analog

BAB VI

PENUTUP

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Sedangkan masyarakat terdiri dari perguruan tinggi, swasta, petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan serta lembaga pangan di masyarakat. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi harus dilandasi semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, serta ditunjang dengan keamanan pangan.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan dan gizi tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi, dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang kuat maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang tersedia.

Renstra Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan. Dengan demikian dapat dijadikan acuan untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sasaran Konsumsi Pangan Tahun 2015-2019

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/hari					Kg/Kap/Tahun					ton/tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi-padian															
	Beras	263.8	262.7	261.7	260.7	259.6	96.2	95.9	95.5	95.1	94.8	24,575,415.5	24,810,319.8	25,016,325.2	25,214,057.9	25,403,246.7
	Jagung	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	395,016.0	398,452.1	401,760.5	404,936.1	407,974.5
	Terigu	28.2	28.1	28.0	27.9	27.8	10.3	10.3	10.2	10.2	10.1	2,630,485.7	2,653,367.1	2,675,398.6	2,696,545.4	2,716,778.4
2	Umbi-umbian															
	Singkong	25.1	32.3	39.6	46.8	54.0	9.2	11.8	14.4	17.1	19.7	2,338,817.9	3,051,564.9	3,780,609.7	4,525,427.7	5,285,460.8
	Ubi jalar	10.5	13.6	16.6	19.6	22.7	3.8	4.9	6.1	7.2	8.3	981,020.9	1,279,983.7	1,585,782.8	1,898,197.8	2,216,994.9
	Kentang	5.8	7.5	9.2	10.9	12.5	2.1	2.7	3.3	4.0	4.6	542,498.1	707,822.6	876,927.5	1,049,691.0	1,225,983.7
	Sagu	1.5	2.0	2.4	2.9	3.3	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	142,533.9	185,970.6	230,400.6	275,791.8	322,110.3
	Umbi lainnya	1.6	2.0	2.5	2.9	3.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	147,248.1	192,121.5	238,021.0	284,913.5	332,763.9
3	Pangan hewani															
	Daging ruminansia	4.1	4.2	4.4	4.6	4.8	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	378,382.8	400,003.7	421,953.7	444,214.8	466,768.8
	Daging unggas	17.1	17.9	18.7	19.4	20.2	6.3	6.5	6.8	7.1	7.4	1,598,703.5	1,690,053.6	1,782,794.6	1,876,850.1	1,972,142.8
	Telur	21.2	22.2	23.1	24.0	25.0	7.8	8.1	8.4	8.8	9.1	1,981,329.9	2,094,543.5	2,209,480.7	2,326,046.9	2,444,146.6
	Susu	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	649,572.9	686,689.6	724,371.4	762,587.3	801,305.9
	Ikan	57.7	60.3	62.8	65.3	67.9	21.1	22.0	22.9	23.8	24.8	5,382,929.0	5,690,510.5	6,002,774.8	6,319,465.1	6,640,321.5
4	Minyak dan Lemak															
	Minyak kelapa	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	236,026.7	233,203.2	230,183.4	226,967.5	223,556.7
	Minyak sawit	23.3	22.8	22.2	21.6	21.1	8.5	8.3	8.1	7.9	7.7	2,176,952.4	2,150,910.4	2,123,057.2	2,093,396.0	2,061,937.5
	Minyak lainnya	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	47,678.9	47,108.5	46,498.5	45,848.8	45,159.8
5	Buah/Biji berminyak															
	Kelapa	6.8	7.6	8.4	9.3	10.1	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	630,869.5	718,370.7	807,688.1	898,754.7	991,500.7
	Kemiri	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	113,778.3	129,559.2	145,667.8	162,091.8	178,818.6
6	Kacang-kacangan															
	Kedele	24.2	27.1	29.9	32.8	35.6	8.8	9.9	10.9	12.0	13.0	2,260,006.2	2,557,957.6	2,862,032.9	3,172,003.8	3,487,631.5
	Kacang tanah	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	88,119.3	99,736.6	111,592.7	123,678.7	135,985.2
	Kacang hijau	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	79,743.1	90,256.2	100,985.3	111,922.5	123,059.2
	Kacang lainnya	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Gula															
	Gula pasir	23.5	24.4	25.2	26.0	26.8	8.6	8.9	9.2	9.5	9.8	2,195,683.4	2,301,372.3	2,408,484.2	2,516,928.6	2,626,614.7
	Gula merah	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	176,648.5	185,151.5	193,768.9	202,493.5	211,318.1
8	Sayuran dan buah															
	Sayur	164.9	166.4	167.9	169.4	170.8	60.2	60.7	61.3	61.8	62.4	15,376,275.2	15,711,773.6	16,047,272.2	16,382,424.2	16,716,905.0
	Buah	93.7	94.6	95.4	96.3	97.1	34.2	34.5	34.8	35.1	35.4	8,740,550.7	8,931,262.8	9,121,974.9	9,312,490.0	9,502,623.6
9	Lain-lain															
	Minuman	57.3	65.2	73.2	81.1	89.0	20.9	23.8	26.7	29.6	32.5	5,339,633.1	6,157,736.7	6,993,120.4	7,845,163.4	8,713,213.6
	Bumbu	11.2	12.7	14.2	15.8	17.3	4.1	4.6	5.2	5.8	6.3	1,039,708.8	1,199,006.2	1,361,668.2	1,527,574.1	1,696,596.9
	Proyeksi Jumlah Penduduk											255,461,700	258,705,000	261,890,900	265,015,300	268,074,600

Keterangan :

1. Proyeksi dengan *baseline tahun* 2014 pada RPJMN 2015-2019 dan capaian skor PPH 92.5 dan AKE 2150 pada tahun 2019
2. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Bappenas dan BPS (2013)

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI	URGENSI	REGULASI TERKAIT	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	TARGET
1	Penyediaan pangan	<p>a. Penyelenggaraa pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.</p> <p>b. Pemerintah perlu menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai usulan Pemerintah Daerah</p> <p>c. Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai distribusi pangan</p> <p>d. Diperlukan revisi perundangan terkait otonomi daerah yang menetapkan kembali penanganan ketahanan pangan sebagai urusan pemerintah pusat karena berkaitan dengan ketahanan nasional</p>	<p>UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan</p> <p>Pasal 12 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan</p>	<p>BKP</p> <p>BKP</p> <p>BKP</p> <p>BKP</p>	<p>Pemda</p> <p>Pemda</p> <p>Pemda</p> <p>Pemda</p>	<p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p>

Lampiran 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Juta Rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan							635,258.60	783,064.32	963,760.70	1,259,823.76	1,439,900.47
		Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.10	86.20	88.4	90.5	92.5					
		Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2,004	2,040	2,077	2,113	2,150					
			Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	56.10	56.40	56.60	56.80	57.00					
			Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi (org/thn)	81	160	245	330	400					
		Stabilinya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP					
			Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV)	CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%					
		Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87.52	89.71	92.04	94.25	96.32					
			Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/Tahun)	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %					
	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan								107,265.01	285,414.00	466,027.77	675,598.62	1,081,802.26
		Meningkatnya Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan Serta Stabilitas Harga Pangan											
			Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (Gapoktan)	358	241	248	90	135	45,944.91	17,801.00	18,318.04	6,647.68	9,971.51
			Jumlah lumbung pangan masyarakat (Unit)	1,724	1,628	800	1,492	1,492	45,720.20	43,813.00	21,529.73	40,152.95	40,152.95
			Jumlah lokasi panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN (Lokasi)	35	35	35	35	35	5,185.27	15,150.00	16,665.00	18,331.50	20,164.65
			Jumlah hasil pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan (Lokasi)	3	3	3	3	3	6,132.31	4,050.00	4,455.00	4,900.50	5,390.55
			Jumlah Toko Tani Indonesia/TTI (Unit)	0	1,000	2,000	3,000	5,000	-	200,000.00	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00
			Jumlah kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan (Judul)	1	1	1	1	1	2,262.44	1,500.00	1,650.00	1,815.00	1,996.50
			Jumlah kajian distribusi pangan (Rekomendasi)	27	27	27	27	27	2,019.89	3,100.00	3,410.00	3,751.00	4,126.10

Lampiran 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Juta Rupiah)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan									111,609.25	268,436.50	285,365.28	320,385.98	71,261.48
		Meningkatnya ketersediaan dan penanganan rawan pangan												
			Jumlah unit penggilingan padi menunjang stok beras nasional (Unit)	-	50,000	75,000	100,000	125,000	-	12,500.00	18,750.00	25,000.00	31,250.00	
			Jumlah hasil analisis neraca bahan makanan (Laporan)	35	35	35	35	35	14,078.52	3,040.00	3,344.00	3,678.40	4,046.24	
			Jumlah lokasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (Lokasi)	456	35	35	35	35	13,340.87	7,422.00	8,164.20	8,980.62	9,878.68	
			Jumlah hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan (Judul)	27	27	27	27	27	7,061.86	2,360.00	2,596.00	2,855.60	3,141.16	
			Jumlah analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA)	35	1	1	1	1	1,825.10	900.00	990.00	1,089.00	1,197.90	
			Jumlah kawasan mandiri pangan (Kawasan)	192	190	110	135	75	66,503.63	28,624.50	16,572.08	20,338.46	11,299.14	
			Jumlah hasil pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan (Lokasi)	35	35	35	35	35	8,799.27	7,850.00	8,635.00	9,498.50	10,448.35	
			Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender (KK)	33,600	33,600	33,600	33,600		-	19,588.60	21,547.46	23,702.21		
			Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran (KK)	26,880	26,880	26,880	26,880		-	130,578.05	143,635.86	157,999.44		
			Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan (Desa)	224	224	224	224		-	4,953.15	5,448.47	5,993.31		
			Jumlah dukungan manajemen dan administrasi SOLID (Bulan Layanan)	12	12	12	12		-	50,620.20	55,682.22	61,250.44		
	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan									132,894.73	125,717.39	98,521.58	138,608.48	149,082.98
		Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan												
			Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (Desa)	4,410	2,894	1,306	2,612	2,612	92,886.73	66,314.00	29,926.08	59,852.17	59,852.17	
			Jumlah pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan (Lokasi)	35	34	34	34	34	11,247.68	9,000.00	9,900.00	10,890.00	11,979.00	
			Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (Lokasi)	35	35	35	35	35	5,173.29	9,800.30	10,780.33	11,858.36	13,044.20	
			Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan (Rekomendasi)	35	35	35	35	35	4,832.86	5,950.00	6,545.00	7,199.50	7,919.45	
			Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal (Unit)	27	29	27	27	27	8,041.23	4,450.00	4,143.10	4,557.41	5,013.16	
			Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan (Rekomendasi)	65	86	106	126	146	10,712.94	30,203.09	37,227.06	44,251.04	51,275.01	

Lampiran 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Juta Rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan							283,489.61	103,496.43	113,846.07	125,230.68	137,753.75
			Jumlah dokumen rencana program, anggaran dan kerja sama (Dokumen)	35	35	35	35	35	10,629.63	11,586.67	12,745.34	14,019.87	15,421.86
			Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan (Dokumen)	35	35	35	35	35	5,794.81	7,600.00	8,360.00	9,196.00	10,115.60
			Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program (Laporan)	35	35	35	35	35	26,096.21	26,750.00	29,425.00	32,367.50	35,604.25
			Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum (Dokumen)	3	3	3	3	3	17,377.18	5,450.00	5,995.00	6,594.50	7,253.95
			Jumlah perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	7,245.69	7,400.00	8,140.00	8,954.00	9,849.40
			Jumlah layanan manajemen dan administrasi (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12	20,656.09	16,320.00	17,952.00	19,747.20	21,721.92
			Jumlah Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12	32,610.00	28,389.76	31,228.74	34,351.61	37,786.77
			Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender (KK)	33,600	33,600	33,600	33,600	-	21,732.20	19,588.60	21,547.46	23,702.21	2,370.22
			Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran (KK)	26,880	26,880	26,880	26,880	-	70,729.75	130,578.05	143,635.86	157,999.44	15,799.94
			Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan (Desa)	224	224	224	224	-	33,610.88	4,953.15	5,448.47	5,993.31	599.33
			Jumlah dukungan manajemen dan administrasi SOLID (Bulan Layanan)	12	12	12	12	-	37,007.18	50,620.20	55,682.22	61,250.44	6,125.04



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550
Telp. 021—7805035 - 7805641; Fax. 021 - 78846536
Website.<http://bkp.pertanian.go.id>